

Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perkotaan di Indonesia

Chei Milki Nugraha Kurniawan *¹
M. Afdal Samsuddin ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
cheimilkinugrahak@gmail.com¹, mafdal@gmail.ubb.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja perkotaan di Indonesia dengan menggunakan data panel 34 provinsi selama tahun 2020–2024 melalui metode *Random Effect Model* (REM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa upah minimum (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan koefisien sebesar -4,662568 dan *p-value* 0,0000. Sebaliknya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki koefisien -0,458875 dan *p-value* 0,6469, sehingga tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mencerminkan indikasi *jobless growth*, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan serapan tenaga kerja karena lebih banyak mengandalkan investasi berbasis modal. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk menerapkan kebijakan upah minimum yang fleksibel dan mendorong sektor padat karya guna meningkatkan kesempatan kerja di wilayah perkotaan.

Kata kunci: Covid-19, Data Panel, Penyerapan Tenaga Kerja, Perkotaan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum.

Abstract

This study aims to analyze the effect of minimum wage and economic growth on urban employment in Indonesia by using panel data of 34 provinces during 2020-2024 through the *Random Effect Model* (REM) method. The estimation results show that the minimum wage (UMP) has a negative and significant effect on employment, with a coefficient of -4.662568 and a *p-value* of 0.0000. In contrast, Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a coefficient of -0.458875 and a *p-value* of 0.6469, so it has no significant effect. This finding reflects an indication of *jobless growth*, where economic growth is not followed by an increase in labor absorption because it relies more on capital-based investment. Therefore, the government is advised to implement a flexible minimum wage policy and encourage labor-intensive sectors to increase employment opportunities in urban areas.

Keywords: Covid-19, Economic Growth, Labor Absorption, Minimum Wage, Panel Data, Urban.

PENDAHULUAN

Penyerapan tenaga kerja pada perkotaan di Indonesia memperlihatkan pola yang saling bertentangan dalam periode pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Sejak tahun 2021, Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi yang baik setelah sebelumnya mengalami penurunan karena pandemi COVID-19 (Widiyantara, 2023). Akan tetapi, berdasarkan data pada publikasi Badan Pusat Indonesia tahun 2024 tingkat pengangguran pada wilayah perkotaan masih tergolong cukup tinggi, terutama di beberapa provinsi seperti Maluku dan Aceh, yang mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi masih belum sepenuhnya merata. Di samping itu, terdapat perbedaan yang semakin jelas dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai kawasan perkotaan. Wilayah perkotaan seperti pada Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan wilayah perkotaan di luar Pulau Jawa. Di sisi lain, kebijakan upah minimum juga mengalami peningkatan yang cukup besar selama masa transisi pandemi, hal ini akan memengaruhi keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja (Nurfardhan et al., 2025).

Ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja perkotaan di berbagai wilayah Indonesia tercermin dalam data yang ada. Sebagai contoh, walaupun Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah mengalami lonjakan besar dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 setelah pandemi dengan masing-masing berada pada angka 20,49 persen dan 11,91

persen serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) keduanya yang masing-masing berada di angka 6,07 persen dan 4,48 persen menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja di perkotaan masih belum sepenuhnya sejalan, berbeda dengan Bali yang memiliki TPT jauh lebih rendah yaitu 3,08 persen meskipun pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 5,71 persen (BPS, 2023). Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi tidak selalu menghasilkan lapangan pekerjaan secara seimbang, sebab pertumbuhan yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah pekerjaan dan kelesuan ekonomi bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja (Rahmah & Juliannisa, 2022).

Salah satu faktor lain yang diperkirakan turut memengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Kenaikan ini sering kali tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, di mana kondisi kenaikan upah dapat mendorong pelaku usaha untuk membatasi penyerapan tenaga kerja karena beban yang dipikul semakin besar (Prayogo & Indira Hasmarini, 2022). Di sisi lain, sektor perkotaan juga sedang mengalami perubahan besar setelah pandemi COVID-19, di mana pendekatan kerja yang lebih fleksibel, peralihan dari sektor bisnis fisik ke digital, serta peningkatan efisiensi tenaga kerja mulai diterapkan secara meluas. Perubahan ini semakin parah akibat digitalisasi dan otomatisasi yang menggantikan banyak pekerjaan manual, terutama dalam bidang jasa dan industri ringan (Rosadi & Tomy, 2024). Menurut (McKinsey, 2019) proses digitalisasi di Indonesia dapat memengaruhi 23 juta pekerjaan, terutama pada wilayah perkotaan yang cepat dalam adaptasi teknologi.

Keadaan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja perkotaan dalam rangka penyusunan kebijakan ekonomi makro. Pemerintah membutuhkan data yang nyata untuk menentukan upah minimum yang paling sesuai, hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan akibat kenaikan upah, baik bagi tenaga kerja maupun pelaku usaha (Utami, 2019). Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang dinamika pasar tenaga kerja, strategi pemulihan ekonomi nasional berpotensi tidak efektif, terutama jika kebijakan tenaga kerja tidak sejalan dengan kebutuhan sektor riil. Selain itu, menurut (BPS, 2019) proyeksi urbanisasi yang menyatakan bahwa pada tahun 2045 sebanyak 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap penyerapan tenaga kerja di perkotaan akan semakin tinggi. Dalam kondisi seperti itu, harmonisasi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang ada (Tjiptoherijanto, 2017).

Masalah penyerapan tenaga kerja di berbagai kota di Indonesia tetap menjadi hambatan, meskipun ada pertumbuhan dalam perekonomian daerah. Menurut penelitian-penelitian lain beberapa daerah yang mencatatkan peningkatan PDRB ternyata tidak selalu sejalan dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang diserap. Selain itu, kebijakan tentang peningkatan upah minimum belum tentu membawa dampak positif bagi penciptaan peluang kerja baru. Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya bentrokan antara tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan konteks dan fenomena yang telah dijelaskan, penelitian ini mengarahkan perhatian pada tiga pertanyaan inti. Pertama, bagaimana dampak dari kebijakan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan? Kedua, seberapa besar pertumbuhan ekonomi di daerah berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang bertambah di perkotaan? Ketiga, bagaimana cara merancang kebijakan yang bisa menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana upah minimum dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan. Studi ini akan mengeksplorasi sejauh mana peningkatan upah dan pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan saran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait ketenagakerjaan serta memperkaya kajian ilmiah mengenai pasar kerja pada perkotaan di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Banyak penelitian yang sudah menemukan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, baik dalam lingkup luas seperti dalam skala internasional dan nasional atau yang lebih khusus seperti provinsi dan kabupaten atau kota. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rudatin et al., 2024) pada skala internasional dengan meneliti sepuluh negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di mana ditemukan bahwa tiga dari empat faktor berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dua di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan upah. Hasil ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan dalam skala nasional, dikatakan bahwa di Indonesia penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh PDB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum (Sitompul & Simangunsong, 2019). Sedangkan menurut (Hasanah, 2022) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan, berbeda dengan upah minimum yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut (Iksan et al., 2020) ditemukan bahwa setiap satu persen kenaikan upah akan menyerap 169.971 tenaga kerja dan setiap kenaikan satu persen dari pertumbuhan ekonomi akan menyerap 2.329.450 juta tenaga kerja. Namun, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Jaya & Kholilah, 2020) bahwa salah satu faktor yang memiliki hubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi atau PDRB, sedangkan upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ummah, 2021) dengan pendekatan regresi data panel dengan model *Fixed Effect* dihasilkan bahwa keduanya, yaitu PDRB sebagai cerminan dari pertumbuhan ekonomi dan upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pada wilayah yang lebih khusus seperti lingkup Pulau Sumatera melalui hasil penelitian dari (Pratama et al., 2020) menyatakan bahwa dalam jangka panjang, upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Di sisi lain, dalam jangka pendek, upah minimum justru berdampak negatif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tetap tidak berpengaruh signifikan. Sementara, pada wilayah provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa baik pertumbuhan ekonomi maupun upah minimum provinsi justru memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, peningkatan kedua variabel tersebut tidak selalu diikuti dengan meningkatnya serapan tenaga kerja di kawasan ini (Yanda et al., 2022). Pada penelitian di Pulau Jawa didapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan upah minimum sebaliknya, yaitu tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Widyapangesti & Soelistyo, 2022).

Pada tingkat provinsi seperti di Sumatera Barat, di mana (Larasati & Utomo, 2023) hanya meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada provinsi lain seperti Jawa timur, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hasil ini didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Warapsari et al., 2021). Menurut (Prayogo & Indira Hasmarini, 2022) yang melakukan penelitian serupa di Provinsi DI Yogyakarta didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan upah minimum dan pertumbuhan ekonomi juga akan menghasilkan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja. Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak jumlah penduduk produktif, diketahui bahwa penyerapan tenaga kerjanya dipengaruhi oleh upah minimum, akan tetapi penyerapan tenaga kerja tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (Rahmah & Juliannisa, 2022).

Pada wilayah yang lebih kecil seperti kabupaten atau kota, sebagai contoh, Kota Manado, di mana penelitian pada kota ini dilakukan oleh (Sabihi et al., 2021), disebutkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada sisi kabupaten, penelitian dilakukan oleh (Insana & Mahmud, 2021) ditemukan bahwa penyerapan tenaga kerja di pengaruhi oleh upah minimum secara positif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan. Sejauh ini, studi yang meneliti dampak upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja belum banyak yang secara spesifik mengkaji konteks wilayah perkotaan. Ini karena struktur ekonomi dan karakteristik tenaga kerja di kota berbeda

dibandingkan dengan daerah lain, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terfokus. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi periode setelah pandemi, meskipun krisis tersebut menyebabkan perubahan signifikan di pasar kerja, terutama di sektor-sektor perkotaan. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan data nasional secara keseluruhan, tanpa mempertimbangkan perbedaan yang ada di antara daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menekankan analisis di wilayah perkotaan, memanfaatkan data panel antar provinsi, serta mempertimbangkan kondisi setelah pandemi dalam memahami dinamika penyerapan tenaga kerja.

Untuk memperkuat landasan konseptual dalam penelitian ini, teori permintaan tenaga kerja neoklasik dan Hukum Okun (*Okun's law*) diterapkan. Teori permintaan tenaga kerja neoklasik mengindikasikan bahwa kenaikan upah, dapat mengurangi permintaan tenaga kerja akibat meningkatnya biaya produksi, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Di sisi lain, Hukum Okun menjelaskan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan *output*, cenderung membuka peluang kerja baru. Maka dari itu, kedua teori ini digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dampak kebijakan upah dan perubahan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan setelah pandemi.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode analisis kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti, melalui pendekatan data panel, dengan unit analisis berupa provinsi di Indonesia selama tahun 2020 hingga 2024. Data yang digunakan mencakup 34 provinsi per tahun, sehingga total terdapat 170 observasi dalam lima tahun. Seluruh data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih akurat atas dinamika ketenagakerjaan di wilayah perkotaan, baik antar daerah maupun antar waktu. Model matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{PNYTNK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{UMP}_{it} + \beta_2 \text{PDRB}_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana PNYTNK_{it} adalah penyerapan tenaga kerja perkotaan pada provinsi ke- i dan tahun ke- t , α adalah konstanta, β_1 dan β_2 merupakan koefisien regresi dari variabel upah minimum (UMP_{it}) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB_{it}), dan ε_{it} adalah *error term*. Pada data panel di penelitian ini dilakukan beberapa pengujian seperti uji pemilihan model terbaik, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan perangkat lunak statistik.

HASIL

Model Data Panel

Data panel digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek waktu dan perbandingan antar wilayah, oleh karena itu diperlukan pemilihan model terbaik untuk menghasilkan estimasi yang tidak bias dan efisien.

Menurut (Septianingsih, 2022) terdapat tiga pengujian untuk menentukan model terbaik, yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (LM).

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model paling sesuai antara *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model*. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis berikut:

H0: Estimasi menggunakan *Common Effect Model* memberikan hasil yang lebih sesuai dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*.

H1: Estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* memberikan hasil yang lebih sesuai dibandingkan dengan *Common Effect Model*

Penolakan terhadap hipotesis nol (H0) dilakukan apabila *p-value* memiliki nilai lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05.

Berikut merupakan hasil dari Uji Chow yang telah dilakukan.

Tabel 1. Hasil Uji Chow	
<i>Prob. Chi square (p-value)</i>	
<i>Cross-section chi-square</i>	0,0000

Berdasarkan hasil Uji Chow, diperoleh *p-value* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H_0 ditolak dan model *Fixed Effect* dinilai lebih sesuai daripada model *Common Effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model paling sesuai antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis berikut:

H_0 : Estimasi menggunakan *Random Effect Model* memberikan hasil yang lebih sesuai dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*

H_1 : Estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* memberikan hasil yang lebih sesuai dibandingkan dengan *random Effect Model*

Penolakan terhadap hipotesis nol (H_0) dilakukan apabila *p-value* memiliki nilai lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05.

Berikut merupakan hasil dari Uji Hausman yang telah dilakukan.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman	
<i>Prob. Chi square (p-value)</i>	
<i>Cross-section chi-square</i>	0,4423

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh *p-value* sebesar 0,4423 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H_0 tidak ditolak dan model *Random Effect* dinilai lebih sesuai daripada model *Fixed Effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier

Model *Random Effect* tidak membutuhkan pengujian asumsi dasar karena menerapkan metode estimasi *Generalized Least Square* (GLS) yang dapat mengatasi autokorelasi dan heteroskedastisitas serta memberikan estimasi yang memenuhi karakteristik *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Kosmaryati et al., 2019).

Berikut merupakan hasil dari regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM) yang telah dilakukan.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8065151.	1310568.	6.153936	0.0000
UMP	-2.041385	0.437824	-4.662568	0.0000
PDRB	-31483.55	68610.28	-0.458875	0.6469

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1874408.	0.2846
Idiosyncratic random		2971783.	0.7154

Weighted Statistics			
R-squared	0.117134	Mean dependent var	1279016.
Adjusted R-squared	0.106561	S.D. dependent var	3140544.
S.E. of regression	2968502.	Sum squared resid	1.47E+15
F-statistic	11.07835	Durbin-Watson stat	1.484954
Prob(F-statistic)	0.000030		

Gambar 1. Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model* (Rem)

Uji Asumsi Klasik

Menurut (Kosmaryati et al., 2019) *Random Effect Model* tidak memerlukan pengujian asumsi klasik karena memakai metode *estimasi Generalized Least Square (GLS)*, yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan autokorelasi pada data runtun waktu serta korelasi di antara unit *cross section*. GLS juga memberikan estimator yang memenuhi sifat *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*, sehingga efektif sebagai solusi untuk mengatasi pelanggaran.

Uji Hipotesis

Menurut (Septianingsih, 2022), pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari koefisien regresi pada model terbaik.

Adapun parameter yang diuji meliputi Koefisien Determinasi, Uji Signifikansi Simultan dan Uji Signifikansi Parsial.

1. Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen secara keseluruhan. Nilai koefisien determinasi berada dalam rentang 0 hingga 1. Dalam hal ini, digunakan nilai *Adjusted R²*, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

Berikut merupakan nilai koefisien determinasi yang telah diperoleh.

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi	
	<i>Adjusted R-squared</i>
<i>Random Effect Model</i>	0,106561

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model *Random Effect*, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,106561. Angka ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum dan pertumbuhan ekonomi dalam model mampu menjelaskan sekitar 10,65 persen variasi dari variabel penyerapan tenaga kerja perkotaan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

2. Uji Signifikasi Simultan

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0: Semua parameter dalam model secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H1: Setidaknya ada satu parameter dalam model yang berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen

Penolakan terhadap hipotesis nol (H0) dilakukan apabila *p-value* memiliki nilai lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05.

Berikut merupakan hasil dari uji signifikasi simultan yang telah dilakukan.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikasi Simultan

	<i>Prob(F-statistic)</i>
<i>Random Effect Model</i>	0,000030

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan yang ditampilkan pada tabel, diperoleh nilai probabilitas (*F-Statistic*) sebesar 0,000030. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja perkotaan.

3. Uji Signifikansi Parsial Variabel Independen

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0: Variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H1: Variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen

Penolakan terhadap hipotesis nol (H0) dilakukan apabila *p-value* memiliki nilai lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05.

Berikut merupakan hasil dari uji Signifikansi Parsial Variabel Independen yang telah dilakukan.

Tabel 5. Hasil Uji Signifikasi Parsial

variabel	Keterangan variabel	Koefisien	Probabilitas
C	konstanta	6,153936	0,0000
X1	Upah minimum	-4,662568	0,0000
X2	Pertumbuhan ekonomi	-0,458875	0,6469

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi Parsial variabel independen yang ditampilkan pada tabel, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Variabel upah minimum memiliki nilai *p-value* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menyebabkan hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja perkotaan.
- b. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *p-value* sebesar 0,6469 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol

tidak ditolak, yang berarti variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja perkotaan.

Analisis Persamaan Regresi

Hasil regresi dengan menggunakan model *Random Effect* menghasilkan persamaan yang menunjukkan hubungan antara variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan Indonesia. Berikut merupakan perolehan persamaannya:

$$\text{PNYTNK} = 8065151.22937 - 2.04138478618 * \text{UMP} - 31483.5458194 * \text{PDRB}$$

Berdasarkan estimasi yang telah dilakukan, variabel upah minimum (UMP) menunjukkan koefisien negatif sebesar 2,041. Ini berarti bahwa setiap peningkatan UMP sebesar 1 persen akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap di perkotaan sebesar 2.041 orang, dengan catatan variabel lainnya tidak berubah. Di sisi lain, variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) mencerminkan koefisien negatif sebesar 31.483,54, yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 31.483 orang, dengan asumsi variabel lain tetap.

PEMBAHASAN

Mengacu pada teori permintaan tenaga kerja dari neoklasik yang menjelaskan terkait pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Alfred Marshal, ketika upah mengalami kenaikan, permintaan terhadap tenaga kerja oleh perusahaan biasanya berkurang karena biaya tenaga kerja menjadi lebih tinggi, sebaliknya, jika upah mengalami penurunan, perusahaan cenderung akan memperbesar permintaan tenaga kerja karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah (Pristiyanto, 2024). Temuan dalam penelitian ini selaras dengan teori permintaan tenaga kerja dari perspektif neoklasik, di mana ketika upah minimum (UMP) mengalami kenaikan, maka akan menurunkan jumlah tenaga kerja perkotaan di Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyapangesti & Soelistyo, 2022) yang berjudul "Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa" yang menyatakan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Upah minimum berfungsi sebagai standar balas jasa bagi tenaga kerja, terutama di sektor formal yang umumnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, upah minimum juga kerap dijadikan acuan pengupahan di sektor informal perkotaan karena dianggap merefleksikan kebutuhan dasar dan biaya hidup sehari-hari di wilayah tersebut. Kenaikan gaji minimum yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk mempertahankan kemampuan beli karyawan dan memastikan kesejahteraan yang pantas. Namun, kebijakan ini sering kali menjadi tantangan bagi sektor usaha dalam beradaptasi dengan beban biaya produksi.

Melalui pertimbangan hal-hal tersebut, perusahaan harus menanggung kenaikan beban biaya produksi yang cukup besar. Peningkatan upah minimum tidak hanya memengaruhi gaji pokok, tetapi juga berdampak pada berbagai komponen tunjangan lain yang biasanya dihitung berdasarkan persentase dari upah dasar, seperti tunjangan hari raya, jaminan sosial, serta berbagai fasilitas kesejahteraan karyawan lainnya. Akumulasi dari seluruh komponen ini pada akhirnya meningkatkan keseluruhan biaya tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, di masa pandemi covid-19 wilayah perkotaan terkena dampak dari kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi yang mana hal ini juga memengaruhi kinerja perusahaan (Mirza et al., 2021).

Kombinasi antara kenaikan biaya upah dan penurunan efisiensi operasional sepanjang pandemi memberikan dua beban berat bagi perusahaan di wilayah perkotaan. Banyak perusahaan terpaksa melakukan penyesuaian dengan mengurangi jumlah pekerja (PHK), mengurangi jam kerja, atau bahkan menutup sementara operasi bisnis mereka. Situasi ini tidak hanya berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan, tetapi juga pada jumlah tenaga kerja

yang dapat diserap di daerah perkotaan, yang pada gilirannya bisa memperburuk angka pengangguran serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada *Okun's Law* (Hukum Okun) yang menjelaskan terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut *Okun's Law*, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB yang mencerminkan pertumbuhan *output* dan aktivitas ekonomi daerah akan mendorong penyerapan tenaga kerja karena pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan tingkat pengangguran (Rahmah & Juliannisa, 2022). Temuan dalam penelitian ini tidak selaras dengan teori permintaan tenaga kerja dari perspektif Hukum Okun, di mana ketika pertumbuhan ekonomi (PDRB) mengalami kenaikan, maka akan menaikkan jumlah tenaga kerja perkotaan di Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yanda et al., 2022) yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi" yang menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama peningkatan kesejahteraan, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja. Namun, di wilayah perkotaan Indonesia, fenomena *jobless growth* mulai menjadi sorotan, yaitu ketika ekonomi tumbuh tetapi tidak diiringi dengan peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan yang didorong oleh sektor-sektor padat modal atau berteknologi tinggi yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, serta pergeseran struktur ekonomi ke sektor informal atau jasa modern yang bersifat fleksibel. Akibatnya, meskipun PDRB kota meningkat dari tahun ke tahun, lapangan kerja formal tidak bertambah secara sepadan, sehingga efek positif pertumbuhan terhadap tenaga kerja menjadi terbatas.

Pada rentang waktu 2020 hingga 2024, pandemi COVID-19 mendorong banyak perusahaan untuk mengoptimalkan biaya produksi guna mempertahankan kelangsungan usaha. Di tengah tekanan tersebut, penggunaan teknologi atau mesin sebagai pengganti tenaga kerja manusia menjadi pilihan yang semakin dominan, terutama di wilayah perkotaan yang merupakan pusat perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi dipandang lebih unggul karena mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi (Setiawati & Al Qoodir, 2021). Melalui percepatan yang dihasilkan oleh teknologi, proses produksi menjadi lebih cepat dan biaya lebih terkendali, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun tidak secara langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih menyeluruh dalam menghadapi masalah penyerapan tenaga kerja di perkotaan. Penetapan upah minimum sebaiknya mempertimbangkan kapasitas penyerapan tenaga kerja dengan melakukan analisis yang mendalam tentang kondisi ekonomi regional dan kemampuan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja. Strategi pertumbuhan ekonomi harus difokuskan pada sektor-sektor yang padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri pengolahan, sektor jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, ada kebutuhan akan kebijakan yang mendorong investasi di sektor-sektor tersebut, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor riil agar dapat mengatasi fenomena pertumbuhan yang tidak menciptakan lapangan kerja di daerah perkotaan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model*, penelitian ini menyimpulkan bahwa upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja perkotaan di Indonesia. Kenaikan UMP cenderung menurunkan permintaan tenaga kerja, sesuai dengan teori neoklasik, sementara peningkatan PDRB justru tidak disertai peningkatan lapangan kerja, mencerminkan fenomena *jobless growth*. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan lebih mengandalkan teknologi dibanding tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh,

seperti penetapan upah yang seimbang serta strategi pertumbuhan ekonomi berbasis sektor padat karya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja secara optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Pemerintah perlu merancang formula penetapan upah minimum yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan menyerap tenaga kerja di setiap daerah. Selain itu, penting untuk memfokuskan pengembangan pada sektor padat karya, mendorong investasi yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan secara terpadu.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti investasi, inflasi, pendidikan, teknologi, dan demografi yang bisa memengaruhi penyerapan tenaga kerja perkotaan. Penggunaan metode analisis yang lebih kompleks seperti VECM juga dapat dipertimbangkan agar hasilnya lebih kuat. Selain itu, cakupan penelitian bisa diperluas dengan membandingkan penyerapan tenaga kerja antar sektor ekonomi atau antar wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda.

3. Bagi masyarakat umum

Masyarakat, terutama untuk tenaga kerja, dianjurkan untuk terus mengasah keterampilan melalui pelatihan atau pendidikan lanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang semakin mengandalkan teknologi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan aktif mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Bagi pelaku usaha, disarankan agar tetap memperhatikan dampak sosial dari keputusan bisnis, khususnya terkait keberlangsungan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2019). *Dinamika Konsumsi Lahan Wilayah Urban di Indonesia* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- BPS. (2023). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Volume 45 No. 2*.
- Hasanah, U. (2022). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Periode 2016-2020. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1, 91–100. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i2.41>
- Iksan, S. A. N., Arifin, Z., & Suliswanto, M. S. W. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(1), 42–55. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i1.9482>
- Insana, N., & Mahmud, A. K. (2021). Dampak Upah, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Takalar. *Buletin of Economic Studies (BEST)*, 1, 47–57.
- Jaya, T. J., & Kholilah, K. (2020). Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and Investment on Labor Absorption. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(3), 236. <https://doi.org/10.26418/jebik.v9i3.42642>
- Kosmaryati, K., Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932>
- Larasati, N., & Utomo, Y. P. (2023). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 7. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.643>
- McKinsey. (2019). *Otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia* (Issue Pekerjaan yang hilang, muncul dan berubah).
- Mirza, M. F. R., Sanstoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Implementasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum di

- Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1–10.
- Nurfardhan, M. R., Firdaus, R. A., Prastiya, Y., & Putra, R. (2025). PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2017 – 2023. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(02), 1104–1115. <https://doi.org/doi.org/10.30651/jms.v10i2.26076>
- Pratama, R. P., Muhammad, S., & Silvia, V. (2020). Do Minimum Wage and Economic Growth Matter for Labor Absorption in Sumatra Island, Indonesia? *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 3(1), 54–61. <https://doi.org/10.36349/EASJEBM.2020.v03i01.07>
- Prayogo, I., & Indira Hasmarini, M. (2022). SEIKO : Journal of Management & Business Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Yogyakarta Tahun 2018-2021. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 77–85. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.3455>
- Pristiyanto, S. M. M. (2024). *Ekonomi dan manajemen sumber daya manusia* (M. M. Dr. dr. Femmy Sofie Schouten (ed.); Pertama). CV. Gita Lentera.
- Rahmah, A. M., & Juliannisa, I. A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupate/Kota Provinsi Jawa Barat. *Ikraith-Ekonomika*, 5(3), 246–254. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v5i3.2460>
- Rosadi, R., & Tomy, C. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.335>
- Rudatin, A., Ghoniyyu, A., Haq, F., Ridha, A., & Perdana, A. (2024). Determinants of labor absorption in ASEAN. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 174–181. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art7>
- Sabihi, D. M., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2021). Pengaruh Upah Minimum Provinsi , Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 25–36.
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan Data Panel Menggunakan Random Effect Model Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 3(3), 525–536. <https://doi.org/10.46306/lb.v3i3.163>
- Setiawati, E., & Al Qoodir, W. (2021). Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 214–243. <https://doi.org/10.24903/je.v10i2.1428>
- Sitompul, T., & Simangunsong, Y. (2019). The Analysis of the Impact of GDP, FDI, Minimum Wage on Employment in Indonesia. *International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities*, 2(2), 53–62. <https://doi.org/10.31098/ijmesh.v2i2.17>
- Tjiptoherijanto, P. (2017). Dinamika Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 1(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v1i2.67>
- Ummah, S. S. (2021). THE RELATIONSHIP OF MINIMUM WAGE, INVESTMENT, GDRP, AND TECHNOLOGY INDEX ON INDONESIAN LABOR ABSORPTION. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1), 82. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i1.26553>
- Utami, P. N. (2019). Penetapan Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Sosio Informa*, 5(02), 162–176. <https://doi.org/doi.org/10.33007/inf.v5i2.1732>
- Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Boedirochminarni, A. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.30742/economie.v2i2.1208>
- Widiyantara, G. (2023). Perkembangan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Journal Intelektual*, 2(2), 136–140. <https://doi.org/10.61635/jin.v2i2.156>
- Widyapangesti, D. I., & Soelistyo, A. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(1), 123–133. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i1.19128>
- Yanda, F. A., Saleh, S. E., & Dai, S. I. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/10.46918/point.v4i2.1635>